

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara wajib memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial. Jumlah penduduk negara Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, semakin banyak pula biaya untuk menyejahterahkan penduduk Indonesia. Hal ini digunakan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, gaji aparatur negara, serta transportasi massal. (Solihah¹) & Nurharibnu Wibisono²) Hery Hermawan³), 2019)

Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat di penuhi melalui kas negara. Sumber kas negara yaitu pajak masyarakat. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Adapun selain membiayai infrastruktur dan fasilitas umum, dana pajak juga dapat dialokasikan untuk membiayai dana sosial dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang.

Oleh karena itu, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan atau kas negara terbesar. Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun

semakin meningkatkan dengan pajak sebagai sumber utamanya. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah - langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan - kebijakan tersebut ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus) dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak.

Undang - undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak. Untuk itu apakah kepatuhan pelaporan pajak ini dapat meningkatkan atau menstabilkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk

menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.(Puji Rahayu, 2016)

Wajib Pajak setiap tahun mengalami peningkatan namun penerimaan pajak tidak selalu meningkat atau tidak stabil. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunannya kepada petugas pajak belum di katakan patuh karena wajib pajak hanya sekedar melaporkan namun tetap tidak membayar pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

Pada kantor pelayanan pajak pratama Sidoarjo Barat adanya terjadi kenaikan dan penurunan penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut berasal dari berbagai sumber salah satunya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Sidoarjo merupakan kabupaten yang cukup luas dan Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada bulan September 2020 menurut hasil sensus penduduk 2020 adalah sebanyak 2.082.801 jiwa. Dengan luas wilayah 714,27 km² persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 2.916 jiwa per km². Berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk laki laki 1.048.574 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.034.227 jiwa, dengan *sex ratio* sebesar 101.(Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021)

Namun, penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat masih mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak stabil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Dengan menggunakan satu variable yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kepatuhan pelaporan SPT Tahunan terhadap penerimaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dapat di tuliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat *kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Di KPP Pratama Sidoarjo Barat tahun 2002 s.d 2019?
2. Bagaimana tingkat *kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Di KPP Pratama Sidoarjo Barat tahun 2002 s.d 2019?
3. Bagaimana tingkat *kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi* secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Di KPP Pratama Sidoarjo Barat tahun 2002 s.d 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

1. Untuk memenuhi syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Sebagai salah satu perwujudan dari Tri Dhrma Perguruan Tinggi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat tahun 2002 s.d 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat tahun 2002 s.d 2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat tahun 2002 s.d 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat patuh dalam pelaporan SPT Tahunan guna meningkatkan penerimaan pajak.
2. Manfaat bagi Pembaca
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek – aspek perpajakan.
 - b. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.
3. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

4. Manfaat bagi peneliti
 - a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
 - b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang yang sebenarnya terjadi dilapangan.

